



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Brigjend Katamso No. 9, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111,
Telpon/Faksimile (0536) 3221585, Laman www.dpmd.kalteng.go.id, Pos-el dpmdes@kalteng.go.id

Palangka Raya, 19 September 2025

Yth. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah.
UP. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah.

Di -
Palangka Raya

SURAT PENGANTAR

Nomor : 800/ 862 /DPMDes/IX/2025

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Hardcopy Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat sebagai bahan tindaklanjut dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas,



H. ARYAWAN, S.IP., M.IP

Pembina Utama Muda

NIP. 19700514 200604 1 010



BerAKHLAK
BerAKHLAK adalah sikap dan perilaku yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari.

#bangga
melayani
bangsa



PERUBAHAN RENJA

2025

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jl. Brigjen Katamso No. 9 Palangka Raya

 @dpmdkalteng



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/253/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, maka perlu ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870)
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 115);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
26. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:
- a. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
 - f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
 - g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
 - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
 - j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - l. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
 - m. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;

- n. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
- p. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
- r. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
- t. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
- u. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
- v. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
- w. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- x. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- y. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- z. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
- aa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
- bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
- cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
- ff. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- gg. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- ii. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- jj. Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
- kk. Rumah Sakit Umum Daerah Hanau;
- ll. Biro Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah;
- mm. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- nn. Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah;
- oo. Biro Hukum Provinsi Kalimantan Tengah;
- pp. Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- qq. Biro Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- rr. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ss. Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- tt. Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- uu. Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang telah ditetapkan, menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 09 Juli 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIAR SABRAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri:
u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
u.p. a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
b. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan;
c. Asisten Administrasi Umum; dan
d. Kepala Biro Hukum
3. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah untuk diketahui.



KATA PENGANTAR

Sebagai upaya memperoleh hasil pembangunan daerah yang sinergi dan komprehensif, diperlukan suatu proses perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, partisipatif, berdaya saing serta mampu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks serta merespon terhadap Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah sebagai lembaga urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di daerah, perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025.

Perubahan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah ini sebagai dokumen perencanaan Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran perubahan serta untuk mereviu hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan. Melalui rencana kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Terima kasih kami ucapkan kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berpartisipasi dalam proses penyusunan dokumen rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah ini.

Palangka Raya, Juli 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah,

H. ARYAWAN, S.IP., M.IP

Pembina Utama Muda

NIP.19700514 200604 1 010





DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	30
2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah	33
2.4 Reviu terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025..	35
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	44
BAB III TUJUAN DAN SASARAN.....	45





3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	45
3.2	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja.....	47
BAB IV	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	50
BAB V	PENUTUP.....	64





DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Laporan Evaluasi Hasil terhadap Renja PD Lingkup Prov. Kalteng	9
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah	32
Tabel 2.3	Permasalahan dan Hambatan Dinas PMD Prov. Kalteng	33
Tabel 2.4	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025	37
Tabel 3.1	Indikator Kinerja Utama Dinas PMD Prov. Kalteng Tahun 2025	49
Tabel 4.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikatif Dinas PMD Prov. Kalteng pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025	50
Tabel 4.2	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas PMD Prov. Kalteng Tahun 2025	54





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Rencana kerja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) yang berisi informasi tentang rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dikerjakan dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pemberdayaan masyarakat dan desa adalah rangkaian upaya untuk memberdayakan masyarakat di desa dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan kemajuan dan kemandirian desa yang secara umum memiliki kondisi sosial, ekonomi dan infrastruktur yang kurang berkembang serta memiliki keterbatasan dalam akses terhadap pelayanan dasar dan keterampilan masyarakat umumnya rendah, sehingga diperlukan untuk dikerjakan bersama agar tidak ada lagi terdapat desa tertinggal di Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk mendorong agar pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa berorientasi pada upaya meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan pelayanan yang baik dalam kerangka menciptakan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

Berangkat dari hal tersebut, penyusunan rencana kerja perubahan tahun 2025 yang berfokus pada penanganan isu strategis yang mengemuka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan





Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berfungsi sebagai dokumen rencana kerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan perubahan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2025 didasari pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Landasan Idiil yaitu Pancasila;
2. Landasan Konstitusional yaitu Undang – Undang Dasar Tahun 1945;
3. Landasan Operasional :
 - a. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah;
 - b. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah;
 - d. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - e. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;





- g. PERMENDAGRI Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
- h. PERMENDAGRI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
- i. PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- j. PERMENDAGRI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
- k. PERMENDAGRI Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- l. PERMENDAGRI Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- m. PERMENDES PDTT Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- n. PERMENDAGRI Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
- o. PERMENDAGRI Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- p. PERMENDES PDTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;





- q. PERMENDAGRI Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- r. PERMENDAGRI Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- s. PERMENDAGRI Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
- t. PERMENDAGRI Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
- u. PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
- v. PERMENDAGRI Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan & Pemberhentian Kepala Desa;
- w. PERMENDES PDTT Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
- x. PERMENDAGRI Nomor 36 Tahun 2020 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- y. PERMENDAGRI Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PERMENDAGRI Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- z. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;





- aa. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- bb. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- cc. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
- dd. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/253/2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan perubahan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 dimaksudkan untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dalam periode satu tahun, yang disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan perubahan yang terjadi di masyarakat serta sinkronisasi perencanaan pembangunan serta menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah khususnya yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Strategis Dinas





Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 - 2029. Serta memberikan gambaran mengenai kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja beserta target kinerja yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah untuk satu tahun.

Secara khusus rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan adaptasi atas perubahan lingkungan strategis sebagai respon organisasi perangkat daerah untuk menjawab yang diperlukan oleh masyarakat.
2. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan yang efektif, efisien dan akuntabel dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan visi, misi dan nilai luhur organisasi.
3. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah serta indikator kinerja yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program satu tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penyusunan perubahan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN;

Memuat rumusan tentang latar belakang berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renja PD dan dilengkapi





definisi, amanat regulasi dan nilai strategis Renja PD; landasan hukum yang relevan dan signifikan sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum; maksud dan tujuan; sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing – masing bab dalam Renja PD.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA;

Memuat analisis kinerja, isu – isu penting sesuai tugas dan fungsi, serta evaluasi pelaksanaan renja PD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN;

Memuat rumusan tentang tujuan dan sasaran renja perangkat daerah satu tahun dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025 - 2029.

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;

Memuat rumusan tentang program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, pagu indikatif, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renja perangkat daerah dalam satu tahun.

BAB V PENUTUP.

Memuat rumusan tentang kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.





BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

Sebagai upaya meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan pelaksanaan evaluasi yang dilakukan melalui penilaian atas pemenuhan target program atau kegiatan. Melalui evaluasi, selanjutnya dapat diketahui hal – hal sebagai berikut :

1. Faktor penyebab target kinerja program/kegiatan/subkegiatan tidak tercapai/tidak terpenuhi/terpenuhi/terlampau;
2. Implikasi terhadap target capaian program RENSTRA Perangkat Daerah;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor penyebab.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan dengan optimal dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Perubahan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 merencanakan empat program, 11 kegiatan dan 57 sub kegiatan dengan alokasi anggaran menjadi Rp50.646.581.262,34,- sebagaimana tertuang dalam rancangan perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.





Tabel 2.1 Laporan Evaluasi Hasil terhadap Renja PD Lingkup Prov. Kalteng

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Renja Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2029 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Capaian Anggaran Tahun 2025 pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Capaian Anggaran Renja PD Prov yg dievaluasi (Realisasi akhir 2025)		Realisasi Kinerja dan Realisasi Capaian Anggaran Renstra PD Prov s/d Tahun 2025 Kolom 13 = (Kolom 6 + Kolom 12)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Prov s/d Tahun 2025 (%)		Unit Penanggung Jawab	
											Triwulan I						14 = (Kolom 13 / Kolom 7) *100			
											K	Rp					K	Rp		K
1	2	3	4		5		6		7		8		12		13		14		15	
			K	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Persen																
	MENINGKATNYA KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH PADA PERANGKAT DAERAH.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)? B	Persen	95,00	19.723.256.151,59	90,00	26.129.009.296,53	91,00	31.051.271.225,34	35,81	2.604.113.997,00	35,81	2.604.113.997,00	125,81	28.733.123.293,53	1,38	0,93	- Subbag Umum & Kepegawaian; - Subbag Keuangan & Aset.	
		PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persen	95,00	1.035.284.764,59	90,00	7.867.910.566,00	91,00	2.997.825.663,48	35,29	202.991.040,00	35,29	202.991.040,00	125,29	8.070.901.606,00	1,38	2,69		





		Daerah Sesuai Aturan.															
	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Dokumen	2,00	10.000.000,00	3,00	15.729.350,00	3,00	15.750.000,00	1,00	846.000,00	1,00	846.000,00	4,00	16.575.350,00	1,33	1,05
	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rka-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Rka-Skpd.	Dokumen	2,00	5.000.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Dpa-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Dpa-Skpd.	Dokumen	2,00	15.000.000,00	2,00	19.107.000,00	2,00	19.146.500,00	1,00	3.221.100,00	1,00	3.221.100,00	3,00	22.328.100,00	1,50	1,17
	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan Dpa-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan Dpa-Skpd.	Dokumen	1,00	15.000.000,00	1,00	36.582.250,00	1,00	20.000.000,00	0,00	-	0,00	-	1,00	36.582.250,00	1,00	1,83





	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd.	Laporan	8,00	10.284.764,59	8,00	10.259.250,00	8,00	10.284.783,00	3,00	2.040.000,00	3,00	2.040.000,00	11,00	12.299.250,00	1,38	1,20
	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Laporan	3,00	980.000.000,00	3,00	7.786.232.716,00	3,00	2.932.644.380,48	1,00	196.883.940,00	1,00	196.883.940,00	4,00	7.983.116.656,00	1,33	2,72
	ADMINISTRASI PERANGKAT KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Persentase	95,00	10.596.724.140,00	90,00	6.481.405.700,00	91,00	9.296.661.255,00	45,16	1.470.442.545,00	45,16	1.470.442.545,00	135,16	7.951.848.245,00	1,49	0,86
	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan Asn.	Orang/Bulan	110,00	10.538.369.679,00	46,00	6.423.285.392,00	76,00	9.238.306.794,00	37,00	1.456.020.395,00	37,00	1.456.020.395,00	83,00	7.879.305.787,00	1,09	0,85





	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd.	Dokumen	12,00	34.854.600,00	12,00	34.780.308,00	12,00	34.854.600,00	3,00	8.684.250,00	3,00	8.684.250,00	15,00	43.464.558,00	1,25	1,25
	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd.	Laporan	1,00	13.499.985,00	4,00	13.369.150,00	1,00	13.499.985,00	1,00	3.292.250,00	1,00	3.292.250,00	5,00	16.661.400,00	5,00	1,23
	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Skpd.	Laporan	4,00	9.999.876,00	10,00	9.970.850,00	4,00	9.999.876,00	1,00	2.445.650,00	1,00	2.445.650,00	11,00	12.416.500,00	2,75	1,24
	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase	95,00	118.112.247,00	90,00	57.968.259,00	91,00	118.112.247,00	80,00	4.406.500,00	80,00	4.406.500,00	170,00	62.374.759,00	1,87	0,53





		Pada Perangkat Daerah.															
	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Skpd.	Dokumen	2,00	9.767.099,00	2,00	9.715.100,00	2,00	9.767.099,00	2,00	2.349.000,00	2,00	2.349.000,00	4,00	12.064.100,00	2,00	1,24
	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah Skpd.	Dokumen	1,00	100.000.000,00	1,00	39.997.659,00	1,00	100.000.000,00	0,00	-	0,00	-	1,00	39.997.659,00	1,00	0,40
	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd.	Laporan	2,00	8.345.148,00	2,00	8.255.500,00	2,00	8.345.148,00	2,00	2.057.500,00	2,00	2.057.500,00	4,00	10.313.000,00	2,00	1,24
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah.	Persentase	95,00	998.000.000,00	90,00	1.254.065.278,00	91,00	624.900.500,00	11,32	9.609.750,00	11,32	9.609.750,00	101,32	1.263.675.028,00	1,11	2,02
	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.	Paket	1,00	350.000.000,00	1,00	507.115.500,00	1,00	1.867.500,00	1,00	160.000,00	1,00	160.000,00	2,00	507.275.500,00	2,00	271,63





	PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Jumlah Dokumen Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.	Dokumen	12,00	8.000.000,00	10,00	7.933.750,00	12,00	8.000.000,00	3,00	7.998.750,00	3,00	7.998.750,00	13,00	15.932.500,00	1,08	1,99
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan.	Orang	20,00	400.000.000,00	20,00	283.420.888,00	20,00	240.004.000,00	1,00	594.000,00	1,00	594.000,00	21,00	284.014.888,00	1,05	1,18
	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan.	Orang	5,00	20.000.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.	Orang	10,00	220.000.000,00	20,00	455.595.140,00	20,00	375.029.000,00	1,00	857.000,00	1,00	857.000,00	21,00	456.452.140,00	1,05	1,22
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Persentase	95,00	2.746.015.000,00	90,00	3.189.448.004,00	91,00	4.020.208.141,86	27,08	294.789.028,00	27,08	294.789.028,00	117,08	3.484.237.032,00	1,29	0,87





	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan.	Paket	1,00	250.015.000,00	1,00	249.350.000,00	1,00	250.015.000,00	1,00	17.646.000,00	1,00	17.646.000,00	2,00	266.996.000,00	2,00	1,07
	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan.	Paket	2,00	150.000.000,00	9,00	710.491.800,00	5,00	690.000.000,00	2,00	35.459.950,00	2,00	35.459.950,00	11,00	745.951.750,00	2,20	1,08
	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan Yang Disediakan.	Paket	12,00	66.000.000,00	12,00	65.998.675,00	12,00	66.000.000,00	3,00	16.450.750,00	3,00	16.450.750,00	15,00	82.449.425,00	1,25	1,25
	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan Yang Disediakan.	Dokumen	4,00	300.000.000,00	1,00	500.000,00	4,00	300.000.000,00	1,00	112.244.000,00	1,00	112.244.000,00	2,00	112.744.000,00	0,50	0,38
	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu.	Laporan	12,00	250.000.000,00	12,00	354.994.250,00	12,00	101.193.141,86	3,00	25.268.800,00	3,00	25.268.800,00	15,00	380.263.050,00	1,25	3,76





	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd.	Laporan	12,00	500.000.000,00	45,00	780.274.820,00	12,00	400.000.000,00	3,00	87.719.528,00	3,00	87.719.528,00	48,00	867.994.348,00	4,00	2,17
	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Skpd.	Dokumen	12,00	30.000.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Skpd.	Dokumen	3,00	1.200.000.000,00	3,00	1.027.838.459,00	3,00	2.213.000.000,00	0,00	-	0,00	-	3,00	1.027.838.459,00	1,00	0,46
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Persen	95,00	1.500.000.000,00	90,00	3.943.669.670,40	91,00	4.211.780.470,00	1,63	1.280.000,00	1,63	1.280.000,00	91,63	3.944.949.670,40	1,01	0,94
	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan.	Unit	1,00	600.000.000,00	5,00	2.068.898.000,00	3,00	401.000.000,00	0,00	-	0,00	-	5,00	2.068.898.000,00	1,67	5,16
	PENGADAAN MEBEL	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan.	Paket	1,00	150.000.000,00	1,00	417.629.750,00	1,00	359.137.635,00	0,00	-	0,00	-	1,00	417.629.750,00	1,00	1,16





	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan.	Unit	20,00	200.000.000,00	100,00	679.512.500,00	91,00	2.591.642.835,00	1,00	200.000,00	1,00	200.000,00	101,00	679.712.500,00	1,11	0,26
	PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Unit Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan.	Unit	1,00	500.000.000,00	1,00	592.142.920,40	1,00	500.000.000,00	0,00	-	0,00	-	1,00	592.142.920,40	1,00	1,18
	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya.	Unit	40,00	50.000.000,00	100,00	185.486.500,00	27,00	360.000.000,00	1,00	1.080.000,00	1,00	1.080.000,00	101,00	186.566.500,00	3,74	0,52
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Persentase	95,00	1.629.120.000,00	90,00	2.341.897.389,00	91,00	3.315.794.983,00	25,00	557.773.693,00	25,00	557.773.693,00	115,00	2.899.671.082,00	1,26	0,87
	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Laporan	12,00	29.120.000,00	100,00	29.090.000,00	12,00	29.120.000,00	3,00	6.250.000,00	3,00	6.250.000,00	103,00	35.340.000,00	8,58	1,21
	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik.	Laporan	4,00	400.000.000,00	3,00	414.446.473,00	4,00	849.674.983,00	1,00	52.651.068,00	1,00	52.651.068,00	4,00	467.097.541,00	1,00	0,55





	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Laporan	12,00	1.200.000.000,00	12,00	1.898.360.916,00	12,00	2.437.000.000,00	3,00	498.872.625,00	3,00	498.872.625,00	15,00	2.397.233.541,00	1,25	0,98
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah.	Persentase	95,00	1.100.000.000,00	90,00	992.644.430,13	91,00	6.465.987.965,00	35,19	62.821.441,00	35,19	62.821.441,00	125,19	1.055.465.871,13	1,38	0,16
	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	Unit	30,00	400.000.000,00	60,00	392.634.077,00	28,00	400.000.000,00	7,00	13.841.441,00	7,00	13.841.441,00	67,00	406.475.518,00	2,39	1,02
	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara.	Unit	20,00	150.000.000,00	71,00	60.000.000,00	20,00	150.000.000,00	7,00	37.500.000,00	7,00	37.500.000,00	78,00	97.500.000,00	3,90	0,65
	PEMELIHARAAN/R EHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/	Unit	1,00	300.000.000,00	1,00	460.010.353,13	1,00	5.665.987.965,00	0,00	-	0,00	-	1,00	460.010.353,13	1,00	0,08





			Direhabilitasi.															
		PEMELIHARAAN/R EHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi.	Unit	10, 00	250.000.0 00,00	24, 00	80.000.00 0,00	5,0 0	250.000.0 00,00	5, 00	11.480.0 00,00	5, 00	11.480.0 00,00	29, 00	91.480.00 0,00	5, 80	0,3 7
MENINGK ATNYA TATA KELOLA PEMERIN TAHAN DESA	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase fasilitasi penataan desa.	Pers en	80, 00	350.000. 000,00	0,0 0	-	0,0 0	-	0, 00	-	0, 00	-	0,0 0	-	0, 00	0,0 0	- Bidang Penyele nggaraa n Pemerin tahan Desa.
	PENATAUSAHAAN PENETAPAN SUSUNAN KELEMBAGAAN, PENGISIAN JABATAN DAN MASA JABATAN KEPALA DESA DAN DESA ADAT	Persentase Pelaksanaa n Penatausah aan Penetapan Susunan Kelembaga an, Pengisian Jabatan Dan Masa Jabatan Kepala Desa Dan Desa Adat.	Pers en	80, 00	350.000. 000,00	0,0 0	-	0,0 0	-	0, 00	-	0, 00	-	0,0 0	-	0, 00	0,0 0	





		IDENTIFIKASI, INVENTARISASI DAN FASILITASI PENATAAN KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN DESA ADAT YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi Dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dan Desa Adat Yang Menjadi Kewenangan Provinsi.	Dokumen	4,00	50.000.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	
		FASILITASI KELEMBAGAAN ADAT DESA	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa Dan Desa Adat.	Dokumen	4,00	50.000.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	
		FASILITASI KABUPATEN/KOTA DAN DESA DALAM RANGKA PENATAAN DESA	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/ Kota Dan Desa Dalam Rangka Penataan Desa.	Dokumen	4,00	100.000.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	
		PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Prasarana Dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa.	Unit	1,00	150.000.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	
MENINGKATNYA TATA KELOLA	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase fasilitasi kerja sama desa.	Persen	80,00	1.300.000.000,00	70,00	476.691.126,00	72,00	579.503.000,00	12,50	28.110.000,00	12,50	28.110.000,00	82,50	504.801.126,00	1,15	0,87	- Bidang Pemberdayaan Pengelol





	PEMERINTAH DESA	FASILITASI KERJASAMA ANTAR DESA YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI	<i>Persentase Pelaksanaan Fasilitas Kerjasama Antar Desa Yang Menjadi Kewenangan Provinsi.</i>	<i>Persentase</i>	80,00	1.300.000.000,00	70,00	476.691.126,00	72,00	579.503.000,00	12,50	28.110.000,00	12,50	28.110.000,00	82,50	504.801.126,00	1,15	0,87	aan SDA, Kawasan Perdesaan dan Ketahanan Masyarakat.
		FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA LINTAS KABUPATEN / KOTA	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Desa Lintas Kabupaten/ Kota.	<i>Dokumen</i>	4,00	100.000.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
		FASILITASI KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA	Jumlah Dokumen Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga Yang Dilaksanakan.	<i>Dokumen</i>	4,00	400.000.000,00	1,00	95.948.081,00	4,00	132.823.000,00	0,00	-	0,00	-	1,00	95.948.081,00	0,25	0,72	
		FASILITASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan.	<i>Dokumen</i>	4,00	800.000.000,00	1,00	380.743.045,00	4,00	446.680.000,00	1,00	28.110.000,00	1,00	28.110.000,00	2,00	408.853.045,00	0,50	0,92	
	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAH DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya.</i>	<i>Persentase</i>	10,00	10.280.000.000,00	10,00	7.587.292.063,00	10,00	9.658.464.482,00	0,00	536.160.943,00	0,00	536.160.943,00	10,00	8.123.453.006,00	1,00	0,84	- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
			<i>Persentase fasilitas tata kelola desa.</i>	<i>Persentase</i>	80,00	10.280.000.000,00	70,00	7.587.292.063,00	72,00	9.658.464.482,00	1,78	536.160.943,00	1,78	536.160.943,00	71,78	8.123.453.006,00	1,00	0,84	- Bidang Kelembagaan, Pembangunan





	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pelaksanaan Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	Persen	80,00	10.280.000.000,00	70,00	7.587.292.063,00	72,00	9.658.464.482,00	1,78	536.160.943,00	1,78	536.160.943,00	71,78	8.123.453.006,00	1,00	0,84	Desa dan Pelayanan Sosial Dasar. - Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Investasi Desa.
	FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA YANG MENGATUR DESA	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Walikota Yang Mengatur Desa.	Dokumen	4,00	200.000.000,00	80,00	102.620.500,00	4,00	82.000.000,00	0,00	-	0,00	-	80,00	102.620.500,00	20,00	1,25	
	PEMBINAAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa.	Dokumen	4,00	700.000.000,00	1,00	870.620.444,00	4,00	540.000.000,00	1,00	6.420.000,00	1,00	6.420.000,00	2,00	877.040.444,00	0,50	1,62	
	FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA	Jumlah Dokumen Produk Hukum Desa Yang Ditetapkan.	Dokumen	4,00	20.000.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	





	FASILITASI PENYUSUNAN, PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan Pembangunan Desa.	Dokumen	4,00	800.000.000,00	0,00	-	4,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
	FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.	Dokumen	4,00	800.000.000,00	1,00	468.637.000,00	4,00	739.952.000,00	1,00	65.211.000,00	1,00	65.211.000,00	2,00	533.848.000,00	0,50	0,72
	FASILITASI PENGELOLAAN ASET DESA	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa.	Dokumen	4,00	400.000.000,00	1,00	569.387.000,00	4,00	639.910.000,00	0,00	-	0,00	-	1,00	569.387.000,00	0,25	0,89
	FASILITASI PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa.	Orang	10,00	200.000.000,00	13,00	24.956.300,00	10,00	31.018.000,00	0,00	-	0,00	-	13,00	24.956.300,00	0,13	0,80
	FASILITASI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa Dan Kelurahan.	Dokumen	4,00	2.200.000.000,00	3,00	1.780.048.048,00	4,00	3.142.485.988,00	1,00	10.630.080,00	1,00	10.630.080,00	4,00	1.790.678.128,00	1,00	0,57





	FASILITASI PELAKSANAAN PROFIL DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa Dan Kelurahan.	Dokumen	4,00	500.000.000,00	1,00	236.442.372,00	4,00	444.397.094,00	1,00	403.729.610,00	1,00	403.729.610,00	2,00	640.171.982,00	0,50	1,44
	PEMBINAAN APARATUR PEMERINTAH DESA	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa.	Orang	300,00	1.000.000.000,00	162,00	1.661.315.683,00	200,00	1.614.032.000,00	0,00	-	0,00	-	162,00	1.661.315.683,00	8,11	1,03
	PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA BPD	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota Bpd.	Orang	50,00	350.000.000,00	142,00	66.080.445,00	50,00	43.499.000,00	0,00	-	0,00	-	142,00	66.080.445,00	2,84	1,52
	PEMBINAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA MELALUI BANTUAN KEUANGAN, BANTUAN PENDAMPINGAN DAN BANTUAN TEKNIS	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan Dan Bantuan Teknis.	Dokumen	4,00	10.000.000,00	0,00	-	4,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	0,25	0,00





		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENETAPAN PENGATURAN BUM DESA KABUPATEN/KOTA DAN LEMBAGA KERJA SAMA ANTAR DESA	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Dan Pengawasan Penetapan Pengaturan Bum Desa Kabupaten Kota Dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa.	Dokumen	4,00	2.500.000.000,00	4,00	1.351.889.256,00	4,00	1.843.520.000,00	1,00	32.350.253,00	1,00	32.350.253,00	5,00	1.384.239.509,00	1,25	0,75	
		FASILITASI PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Dan Penekasan Batas Desa.	Dokumen	4,00	400.000.000,00	45,00	455.295.015,00	4,00	537.650.400,00	1,00	17.820.000,00	1,00	17.820.000,00	46,00	473.115.015,00	11,50	0,88	
		FASILITASI PENCATATAN DATA DAN INFORMASI MENGENAI PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data Dan Informasi Mengenai Pemerintahan Desa Di Kabupaten/ Kota.	Dokumen	4,00	200.000.000,00	0,00	-	4,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	MENINGKATKAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (LKD).	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa (LKD).	Persentase	80,00	7.105.000.000,00	70,00	19.176.856.669,00	72,00	9.357.342.555,00	49,25	1.089.859.358,00	49,25	1.089.859.358,00	119,25	20.266.716.027,00	1,66	2,17	- Bidang Kelembagaan, Pembangunan Desa dan





RAKATAN DESA.	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat.	Pers en	80,00		70,00		72,00		49,25		49,25		119,25		1,66		Pelayanan Sosial Dasar.
PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH PROVINSI SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA BERADA DI LINTAS DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa.	Pers en	80,00	7.105.000.000,00	70,00	19.176.856.669,00	72,00	9.357.342.555,00	49,25	1.089.859.358,00	49,25	1.089.859.358,00	119,25	20.266.716.027,00	1,66	2,17	- Bidang Pemberdayaan Pengelolaan SDA, Kawasan Perdesaan dan Ketahanan Masyarakat. - Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Investasi Desa.





	FASILITASI PENATAAN, PEMBERDAYAAN DAN PENDAYAGUNAAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/ KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan Dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (Rt, Rw, Pkk, Posyandu, Lpm Dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan Dan Masyarakat Hukum Adat.	Dokumen	4,00	700.000.000,00	1,00	12.692.125.868,00	4,00	1.850.000.000,00	0,00	-	0,00	-	1,00	12.692.125.868,00	0,25	6,86
	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/ KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (Rt, Rw, Pkk, Posyandu, Lpm Dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan Dan Masyarakat Hukum Adat Yang Ditingkatka	Lembaga	50,00	2.155.000.000,00	190,00	2.162.830.582,00	50,00	1.636.045.918,00	30,00	186.501.800,00	30,00	186.501.800,00	220,00	2.349.332.382,00	4,40	1,44





		n Kapasitas Kelembagaa nnya.																
		FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.	Dokumen	4,00	800.000.000,00	1,00	316.536.519,00	4,00	1.318.800.000,00	1,00	779.706.500,00	1,00	779.706.500,00	2,00	1.096.243.019,00	0,50	0,83
		FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.	Laporan	4,00	850.000.000,00	1,00	543.775.500,00	4,00	1.044.916.637,00	1,00	27.090.000,00	1,00	27.090.000,00	2,00	570.865.500,00	0,50	0,55





	FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN DESA	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyeleng- garan Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Dan Desa.	Dokumen	4,0	600.000.000,00	5,0	461.588.200,00	4,0	507.580.000,00	1,00	96.561.058,00	1,00	96.561.058,00	6,0	558.149.258,00	1,50	1,10
	FASILITASI TIM PENGGERAK PKK DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak Pkk Dalam Penyeleng- garan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga.	Laporan	1,0	2.000.000.000,00	1,0	3.000.000.000,00	1,0	3.000.000.000,00	0,00	-	0,00	-	1,0	3.000.000.000,00	1,00	1,00
JUMLAH/TOTAL					38.758.256.151,59		53.369.849.154,53		50.646.581.262,34		4.258.244.298,00	0,00	4.258.244.298,00	0,00	57.628.093.452,53	0,00	8,41
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																0,00	8,41
PREDIKAT KINERJA																-	Sangat Rendah





Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja hingga triwulan I tahun 2025 terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah “sangat rendah”. Faktor penghambat pencapaian kinerja antara lain :

1. Penyesuaian agenda/jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga mempengaruhi output kegiatan dan penyerapan anggaran.
2. Proses administrasi pertanggungjawaban kegiatan menggunakan pihak ketiga yang memerlukan penyesuaian.
3. Adanya perubahan dalam satuan target kinerja karena ada penyesuaian.
4. Peran Pemerintahan Desa dan Lembaga kemasyarakatan desa belum optimal dalam pemberdayaan masyarakat dan desa.
5. Sumber daya manusia masih belum optimal dalam pemahaman dan pemanfaatan teknologi informasi.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah memiliki dasar pembentukan yang dimuat dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada BAB XXVI Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada BAB XXVI Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. Dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan





Desa Provinsi Kalimantan Tengah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan. Serta memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan desa, kelembagaan, perkembangan desa dan pelayanan sosial dasar, pemberdayaan pengelolaan sumber daya alam, kawasan perdesaan dan ketahanan masyarakat, pemberdayaan ekonomi dan investasi desa;
- c. Pelaksanaan koordinasi kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong;
- d. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- e. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas.





Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian	Persentase Capaian
			2022	2023	2024	2025	2026	2024	
Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa.	Jumlah desa mandiri	60	65	70	75	80	248	354,29
		Jumlah desa berkembang	767	797	817	837	867	659	80,66
		Jumlah desa tertinggal	330	300	270	240	200	86	31,85
		Jumlah aparatur desa terlatih	650	1010	1380	1770	2170	1943	140,80
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.	Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi desa/kelurahan.	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif.	1730	1740	1750	1760	1770	3714	212,23
		Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berkembang.	720	730	750	760	780	1141	152,13





2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan tupoksi, maka perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan untuk mendukung pencapaian target dan sasaran.

Tabel 2.3 Permasalahan dan Hambatan Dinas PMD Prov. Kalteng

Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
<p>Tugas : membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan.</p> <p>Fungsi : a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; b. Pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan desa, kelembagaan, perkembangan desa dan pelayanan sosial dasar, pemberdayaan pengelolaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang optimalnya tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan. - Rendahnya penggunaan e – government di desa. - Kurangnya pengembangan kelembagaan desa. - Kurang optimalnya pengembangan usaha ekonomi mikro. - Kurang optimalnya pemanfaatan potensi desa. 	<p>Faktor Penghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyesuaian agenda/ jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga mempengaruhi output kegiatan dan penyerapan anggaran. - Proses administrasi pertanggungjawaban kegiatan menggunakan pihak ketiga yang memerlukan penyesuaian. - Adanya perubahan dalam satuan target kinerja karena ada penyesuaian. - Peran Pemerintahan Desa dan Lembaga kemasyarakatan desa belum optimal dalam pemberdayaan masyarakat dan desa. - Sumber daya manusia masih belum optimal dalam





<p>sumber daya alam, kawasan perdesaan dan ketahanan masyarakat, pemberdayaan ekonomi dan investasi desa;</p> <p>c. Pelaksanaan koordinasi kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong;</p> <p>d. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa; dan</p> <p>e. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas.</p>		<p>pemahaman dan pemanfaatan teknologi informasi..</p> <p>Faktor Pendorong :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komitmen yang tinggi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan informasi baik melalui sosialisasi peraturan perundang – undangan mengenai desa kepada aparatur desa. - Adanya pelatihan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dalam penggunaan IT dalam pengelolaan keuangan desa. - Lembaga desa merupakan salah satu sarana dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat - Tingginya keinginan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian keluarga. - Adanya komitmen pemerintah daerah dan pusat berupa sosialisasi serta pelatihan mengenai pengembangan TTG untuk pengelolaan potensi desa.
--	--	---





2.4 Reviu terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Rancangan perubahan RKPD tahun 2025 merupakan acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja perangkat daerah. Reviu terhadap rancangan perubahan RKPD tahun 2025 dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menelaah kesesuaian dengan kebutuhan, yang hasilnya menjadi bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan perubahan RKPD tahun 2025. Proses telaahan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tahun yang tercantum dalam perubahan RKPD tahun 2025;
2. Menyajikan dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan analisis;
3. Memastikan bahwa program/kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas sudah termuat dalam perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025;
4. Menyusun rumusan kebutuhan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah hasil reviu terhadap RKPD yang lengkap dengan indikator kinerja, besaran target/tolok ukur dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan; dan





5. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Berdasarkan hasil telaahan yang telah dilakukan, dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 – 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, tidak ada perbedaan program, kegiatan dan subkegiatan yang berbeda antara rancangan perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun untuk lebih rinci disajikan sebagai berikut :





Tabel 2.4 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Bertambah/ Berkurang
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	8	9	11	12	13
						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				50.646.581.262,34	38.480.627.510,00	(12.165.953.752,34)
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				50.646.581.262,34	38.480.627.510,00	(12.165.953.752,34)
2	13					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				50.646.581.262,34	38.480.627.510,00	(12.165.953.752,34)
1	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)? B	-	91 Persen	31.051.271.225,34	22.917.606.973,00	(8.133.664.252,34)
	2	13	01	1.01		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai aturan.</i>	-	<i>91 Persen</i>	<i>2.997.825.663,48</i>	<i>2.668.534.341,00</i>	<i>(329.291.322,48)</i>
	2	13	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						-
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	3 Dokumen	15.750.000,00	15.750.000,00	-
	2	13	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						-
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	20 Dokumen	2 Dokumen	19.146.500,00	19.146.500,00	-
	2	13	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						-
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	40 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	-
	2	13	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						-
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	8 Laporan	10.284.783,00	10.284.783,00	-
	2	13	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						-
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 Laporan	3 Laporan	2.932.644.380,48	2.603.353.058,00	(329.291.322,48)
	2	13	01	1.02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah.</i>	-	<i>91 Persen</i>	<i>9.296.661.255,00</i>	<i>9.296.661.255,00</i>	-
	2	13	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						-
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/ Bulan	76 Orang/ Bulan	9.238.306.794,00	9.238.306.794,00	-
	2	13	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						-





						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2300 Dokumen	12 Dokumen	34.854.600,00	34.854.600,00	-
2	13	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						-
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	13.499.985,00	13.499.985,00	-
2	13	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						-
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	4 Laporan	9.999.876,00	9.999.876,00	-
2	13	01	1.03		<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</i>	-	91 Persen	118.112.247,00	118.112.247,00	-
2	13	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						-
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10 Dokumen	2 Dokumen	9.767.099,00	9.767.099,00	-
2	13	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						-
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	-
2	13	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						-
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	2 Laporan	8.345.148,00	8.345.148,00	-
2	13	01	1.05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	-	91 Persen	624.900.500,00	624.900.500,00	-
2	13	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						-
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	1.867.500,00	1.867.500,00	-
2	13	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						-
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	12 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	-
2	13	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						-
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang	240.004.000,00	240.004.000,00	-
2	13	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan						-
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	20 Orang	375.029.000,00	375.029.000,00	-
2	13	01	1.06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah</i>	-	91 Persen	4.020.208.141,86	2.964.217.199,00	(1.055.990.942,86)
2	13	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						-





						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	250.015.000,00	250.015.000,00	-
2	13	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	5 Paket	690.000.000,00	690.000.000,00	-
2	13	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	66.000.000,00	66.000.000,00	-
2	13	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	-
2	13	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	101.193.141,86	101.193.142,00	0,14
2	13	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	12 Laporan	400.000.000,00	266.351.422,00	(133.648.578,00)
2	13	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	2.213.000.000,00	1.290.657.635,00	(922.342.365,00)
2	13	01	1.07		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah</i>	-	91 Persen	4.211.780.470,00	698.607.359,00	(3.513.173.111,00)
2	13	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	401.000.000,00	0,00	(401.000.000,00)
2	13	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	359.137.635,00	0,00	(359.137.635,00)
2	13	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	91 Unit	2.591.642.835,00	634.607.359,00	(1.957.035.476,00)
2	13	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)
2	13	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5 Unit	360.000.000,00	64.000.000,00	(296.000.000,00)
2	13	01	1.08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.</i>	-	91 Persen	3.315.794.983,00	3.178.450.354,00	(137.344.629,00)





2	13	04	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.	-	72 Persen	9.658.464.482,00	7.281.096.482,00	(2.377.368.000,00)
2	13	04	1.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa						-
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	1 Dokumen	4 Dokumen	82.000.000,00	68.868.400,00	(13.131.600,00)
2	13	04	1.01	0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa						-
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	4 Dokumen	540.000.000,00	515.000.000,00	(25.000.000,00)
2	13	04	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa						-
						jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	-	4 Dokumen	0,00	500.000,00	500.000,00
2	13	04	1.01	0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa						-
						Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	4 Dokumen	739.952.000,00	709.893.534,00	(30.058.466,00)
2	13	04	1.01	0006	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa						-
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	4 Dokumen	639.910.000,00	599.910.000,00	(40.000.000,00)
2	13	04	1.01	0007	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa						-
						jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	40 Orang	100 Orang	31.018.000,00	10.018.000,00	(21.000.000,00)
2	13	04	1.01	0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan						-
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	4 Dokumen	3.142.485.988,00	1.194.769.988,00	(1.947.716.000,00)
2	13	04	1.01	0009	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan						-
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	4 Dokumen	444.397.094,00	444.397.094,00	-
2	13	04	1.01	0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa						-
						jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	180 Orang	200 Orang	1.614.032.000,00	1.528.220.000,00	(85.812.000,00)
2	13	04	1.01	0011	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD						-
						Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	160 Orang	50 Orang	43.499.000,00	21.659.000,00	(21.840.000,00)
2	13	04	1.01	0012	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis						-
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa	-	4 Dokumen	0,00	58.466,00	58.466,00





						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	2 Lembaga	50 Lembaga	1.636.045.918,00	2.458.761.918,00	822.716.000,00	
	2	13	05	1.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha	Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa					-
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	4 Dokumen	1.318.800.000,00	1.268.800.000,00	(50.000.000,00)	
	2	13	05	1.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna						-
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	4 Laporan	1.044.916.637,00	818.481.637,00	(226.435.000,00)	
	2	13	05	1.01	0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa						-
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen	4 Dokumen	507.580.000,00	381.718.500,00	(125.861.500,00)	
	2	13	05	1.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga						-
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	





2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pola pembangunan yang selaras dan harmonis antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dalam penyusunan perencanaan dilaksanakan secara komprehensif dengan melibatkan partisipasi para pelaku pembangunan. Untuk mendukung hal tersebut, dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, Kemendagri telah memfasilitasi usulan program, kegiatan dan subkegiatan dari Pemerintah Daerah melalui media elektronik, yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dimana SIPD merupakan suatu sistem yang dibangun untuk mendokumentasikan, mengadministrasi serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah memprioritaskan juga pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tupoksinya yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
3. Optimalisasi lembaga desa dan UMKM dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;
4. Peningkatan pemanfaatan Potensi Desa.

Hal tersebut di atas merupakan tolok ukur juga dalam pengusulan dan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang akan datang.





BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 sebagai unsur penunjang Pemerintah, yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi serta bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Penyusunan rancangan perubahan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 sejalan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKP) Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

Penyusunan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dirumuskan untuk mencapai Visi Pembangunan provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 yaitu *”Memantapkan Pembangunan Melalui Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat, Menuju Kalteng Unggul dan Bermartabat”* yang disesuaikan dengan visi misi Gubernur Terpilih Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029 yaitu *”Mengangkat harkat martabat Masyarakat Dayak Khususnya, umumnya Masyarakat Kalimantan Tengah (Menggatang Utus), dengan spirit kearifan lokal dan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju Kalteng Berkah,*





Kalteng Maju, Kalteng Bermartabat untuk menyambut Indonesia Emas 2045” dan juga Tema Pembangunan Lima Tahunan Periode 2025 – 2029 (periode I) pada RPJMD yaitu ”*Penguatan Pondasi Transformasi*” dengan prioritas pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai berikut:

- 1) Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing;
- 2) Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah;
- 3) Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan aglomerasi ekonomi dan daya saing daerah;
- 4) Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
- 5) Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah;
- 6) Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan;
- 7) Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok – kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan





penanggulangan masalah sosial masyarakat secara berkesinambungan;

- 8) Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 9) Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan;
- 10) Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah;
- 11) Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah;
- 12) Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai fungsi untuk mengawal ketercapaian program – program prioritas yang telah ditetapkan, mengevaluasi serta melaksanakan kajian sebagai bahan masukan dalam perencanaan pembangunan daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026,





tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah *meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan*. Berdasarkan tujuan tersebut, indikator capaian diterjemahkan ke dalam sasaran yang akan dicapai selama lima tahun jangka waktu rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu :

- a. Sasaran 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa;
- b. Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
- c. Sasaran 3 : Meningkatnya kapasitas Lembaga ekonomi desa/kelurahan.

Kaitan antara tujuan, sasaran dengan indikator kinerjanya sebagai berikut :





Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama Dinas PMD Prov. Kalteng Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran 2023	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra 2024
<i>Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan</i>	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa.	Jumlah desa mandiri	Desa	65	248
		Jumlah desa berkembang	Desa	797	659
		Jumlah desa tertinggal	Desa	300	86
		Jumlah aparatur desa terlatih	Orang	1010	1943
	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan		Lembaga	1740	3714
	Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi desa/kelurahan		BUMDes	730	1141





BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 disusun untuk merespon penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025. Melalui telaahan terhadap hasil evaluasi terhadap program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan triwulan I tahun anggaran 2025 serta memperhatikan rancangan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikatif Dinas PMD Prov. Kalteng pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RKPD Perubahan 2025
1	2				3	4
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	38.480.627.510,00
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	38.480.627.510,00
	2	13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	38.480.627.510,00
1	2	13	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.917.606.973,00
	2	13	01	1.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	2.668.534.341,00
	2	13	01	1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.750.000,00
	2	13	01	1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	19.146.500,00
	2	13	01	1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	20.000.000,00
	2	13	01	1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.284.783,00
	2	13	01	1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.603.353.058,00
	2	13	01	1.0002	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	9.296.661.255,00
	2	13	01	1.00021	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	





											9.238.306.794,00
2	1	0	1.0	000							
	3	1	2	3							
2	1	0	1.0	000							
	3	1	2	5							
2	1	0	1.0	000							
	3	1	2	7							
2	1	0	1.0								
	3	1	3								
2	1	0	1.0	000							
	3	1	3	1							
2	1	0	1.0	000							
	3	1	3	2							
2	1	0	1.0	000							
	3	1	3	6							
2	1	0	1.0	000							
	3	1	3	5							
2	1	0	1.0	000							
	3	1	3	6							
2	1	0	1.0	000							
	3	1	3	5							
2	1	0	1.0	000							
	3	1	3	6							
2	1	0	1.0	000							
	3	1	3	6							
2	1	0	1.0	000							
	3	1	3	6							
2	1	0	1.0	000							
	3	1	3	6							
2	1	0	1.0	000							
	3	1	3	6							
2	1	0	1.0	000							
	3	1	3	6							
2	1	0	1.0	000							
	3	1	3	6							
2	1	0	1.0	000							
	3	1	3	6							
2	1	0	1.0	000							
	3	1	3	6							
2	1	0	1.0	000							
	3	1	3	6							
2	1	0	1.0	000							
	3	1	3	6							
2	1	0	1.0	000							
	3	1	3	6							
2	1	0	1.0	000							
	3	1	3	6							
2	1	0	1.0	000							
	3	1	3	6							
2	1	0	1.0	000							
	3	1	3	6							
2	1	0	1.0	000							
	3	1	3	6							
2	1	0	1.0	000							
	3	1	3	6							
2	1	0	1.0	000							
	3	1	3	6							
2	1	0	1.0	000							
	3	1	3	6							
2	1	0	1.0	000							
	3	1	3	6							
2	1	0	1.0	000							
	3	1	3	6							
2	1	0	1.0	000							
	3	1	3	6							
2	1	0	1.0	000							
	3	1	3	6							
2	1	0	1.0	000							
	3	1	3	6							
2	1	0	1.0	000							
	3	1	3	6							
2	1	0	1.0	000							
	3	1	3	6							
2	1	0	1.0	000							
	3	1	3	6							
2	1	0	1.0	000							
	3	1	3	6							
2	1	0	1.0	000							
	3	1	3	6							
2	1	0	1.0	000							
	3	1	3	6							
2	1	0	1.0	000							
	3	1	3	6							
2	1	0	1.0	000							
	3	1	3	6							
2	1	0	1.0	000							



							2.437.000.000,00
2	1	0	1.0			<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	3.368.123.718,00
	3	1	9				
2	1	0	1.0	000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	400.000.000,00
	3	1	9	2			
2	1	0	1.0	000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000,00
	3	1	9	6			
2	1	0	1.0	000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.568.123.718,00
	3	1	9	9			
2	1	0	1.0	001		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250.000.000,00
	3	1	9	1			
2	2	1	0			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	354.162.000,00
	3	3	1				
2	1	0	1.0			<i>Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi</i>	354.162.000,00
	3	3	1				
2	1	0	1.0	000		Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	114.537.000,00
	3	3	1	2			
2	1	0	1.0	000		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	239.625.000,00
	3	3	1	3			
3	2	1	0			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	7.281.096.482,00
	3	4	1				
2	1	0	1.0			<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	7.281.096.482,00
	3	4	1				
2	1	0	1.0	000		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	68.868.400,00
	3	4	1	1			
2	1	0	1.0	000		Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	515.000.000,00
	3	4	1	2			
2	1	0	1.0	000		Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	500.000,00
	3	4	1	4			
2	1	0	1.0	000		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	709.893.534,00
	3	4	1	5			
2	1	0	1.0	000		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	599.910.000,00
	3	4	1	6			
2	1	0	1.0	000		Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	10.018.000,00
	3	4	1	7			
2	1	0	1.0	000		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1.194.769.988,00
	3	4	1	8			
2	1	0	1.0	000		Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	444.397.094,00
	3	4	1	9			
2	1	0	1.0	001		Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	1.528.220.000,00
	3	4	1	0			
2	1	0	1.0	001		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	21.659.000,00
	3	4	1	1			
2	1	0	1.0	001		Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	58.466,00
	3	4	1	2			
2	1	0	1.0	001		Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1.680.020.000,00
	3	4	1	5			
2	1	0	1.0	001		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	507.650.400,00
	3	4	1	6			
2	1	0	1.0	001		Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	131.600,00
	3	4	1	8			
4	2	1	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	7.927.762.055,00
	3	5	1				
2	1	0	1.0			<i>Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	7.927.762.055
	3	5	1				





2	1	0	1.0	000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0,00
	3	5	1	2		
2	1	0	1.0	000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.458.761.918,00
	3	5	1	3		
2	1	0	1.0	000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1.268.800.000,00
	3	5	1	5		
2	1	0	1.0	000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	818.481.637,00
	3	5	1	6		
2	1	0	1.0	000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	381.718.500,00
	3	5	1	8		
2	1	0	1.0	000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3.000.000.000,00
	3	5	1	9		

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dengan total kebutuhan dana sebesar Rp.38.480.627.510,- disajikan pada tabel sebagai berikut.





Tabel 4.2 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas PMD Prov. Kalteng Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Bertambah/ Berkurang	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	11	12	13	
						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				50.646.581.262,34	38.480.627.510,00	(12.165.953.752,34)	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				50.646.581.262,34	38.480.627.510,00	(12.165.953.752,34)	
	2	13					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				50.646.581.262,34	38.480.627.510,00	(12.165.953.752,34)
1	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	91 Persen	31.051.271.225,34	22.917.606.973,00	(8.133.664.252,34)	
	2	13	01	1.01		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai aturan.</i>	-	<i>91 Persen</i>	<i>2.997.825.663,48</i>	<i>2.997.825.663,48</i>	-	
	2	13	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					-		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 Dokumen	3 Dokumen	15.750.000,00	15.750.000,00	-	
	2	13	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					-		
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		20 Dokumen	2 Dokumen	19.146.500,00	19.146.500,00	-	
	2	13	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					-		
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		40 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
	2	13	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					-		





						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	8 Laporan	10.284.783,00	10.284.783,00	-
2	13	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						-
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 Laporan	3 Laporan	2.932.644.380,48	2.603.353.058,00	(329.291.322,48)
2	13	01	1.02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah.</i>	-	91 Persen	9.296.661.255,00	9.296.661.255,00	-
2	13	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						-
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/Bulan	76 Orang/Bulan	9.238.306.794,00	9.238.306.794,00	-
2	13	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						-
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2300 Dokumen	12 Dokumen	34.854.600,00	34.854.600,00	-
2	13	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						-
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	13.499.985,00	13.499.985,00	-
2	13	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						-
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	4 Laporan	9.999.876,00	9.999.876,00	-
2	13	01	1.03		<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</i>	-	91 Persen	118.112.247,00	118.112.247,00	-





2	13	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						-
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10 Dokumen	2 Dokumen	9.767.099,00	9.767.099,00	-	
2	13	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						-
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
2	13	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						-
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	2 Laporan	8.345.148,00	8.345.148,00	-	
2	13	01	1.05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	-	91 Persen	624.900.500,00	624.900.500,00	-
2	13	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						-
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	1.867.500,00	1.867.500,00	-	
2	13	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						-
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	12 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	-	
2	13	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						-
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang	240.004.000,00	240.004.000,00	-	
2	13	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan						-
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	20 Orang	375.029.000,00	375.029.000,00	-	
2	13	01	1.06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah</i>	-	91 Persen	4.020.208.141,86	4.020.208.141,86	-





2	13	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					-	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	250.015.000,00	250.015.000,00	-	
2	13	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					-	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	5 Paket	690.000.000,00	690.000.000,00	-	
2	13	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					-	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	66.000.000,00	66.000.000,00	-	
2	13	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					-	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	-	
2	13	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					-	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	101.193.141,86	101.193.142,00	0,14	
2	13	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					-	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	12 Laporan	400.000.000,00	266.351.422,00	(133.648.578,00)	
2	13	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					-	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	2.213.000.000,00	1.290.657.635,00	(922.342.365,00)	
2	13	01	1.07		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah</i>	-	91 Persen	4.211.780.470,00	4.211.780.470,00	-





	2	13	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					-	
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	401.000.000,00	0,00	(401.000.000,00)	
	2	13	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel					-	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	359.137.635,00	0,00	(359.137.635,00)	
	2	13	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					-	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	91 Unit	2.591.642.835,00	634.607.359,00	(1.957.035.476,00)	
	2	13	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-	
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	
	2	13	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5 Unit	360.000.000,00	64.000.000,00	(296.000.000,00)	
	2	13	01	1.08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.</i>	-	<i>91 Persen</i>	<i>3.315.794.983,00</i>	<i>3.315.794.983,00</i>	-
	2	13	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					-	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	12 Laporan	29.120.000,00	29.120.000,00	-	
	2	13	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					-	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	4 Laporan	849.674.983,00	712.330.354,00	(137.344.629,00)	
	2	13	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					-	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.437.000.000,00	2.437.000.000,00	-	





	2	13	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah.	-	91 Persen	6.465.987.965,00	6.465.987.965,00	-
	2	13	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					-	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		28 Unit	28 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00	-
	2	13	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					-	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		71 Unit	20 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	-
	2	13	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					-	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	1 Unit	5.665.987.965,00	2.568.123.718,00	(3.097.864.247,00)
	2	13	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		24 Unit	5 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	-
2	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase fasilitasi kerja sama desa	-	72 Persen	579.503.000,00	354.162.000,00	(225.341.000,00)
	2	13	03	1.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Persentase pelaksanaan fasilitasi kerja sama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi	-	72 Persen	579.503.000,00	579.503.000,00	-
	2	13	03	1.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga					-	
						Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan		1 Dokumen	4 Dokumen	132.823.000,00	114.537.000,00	(18.286.000,00)
	2	13	03	1.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan					-	





						jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	4 Dokumen	446.680.000,00	239.625.000,00	(207.055.000,00)	
3	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	-	10 Persen	9.658.464.482,00	7.281.096.482,00	(2.377.368.000,00)
							Persentase fasilitas tata kelola desa	-	72 Persen			
	2	13	04	1.01		<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	<i>Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.</i>	-	72 Persen	9.658.464.482,00	9.658.464.482,00	-
	2	13	04	1.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa					-	
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	1 Dokumen	4 Dokumen	82.000.000,00	68.868.400,00	(13.131.600,00)	
	2	13	04	1.01	0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa					-	
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	4 Dokumen	540.000.000,00	515.000.000,00	(25.000.000,00)	
	2	13	04	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa					-	
						jumlah Dokumen hasil Fasilitas Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	-	4 Dokumen	0,00	500.000,00	500.000,00	
	2	13	04	1.01	0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa					-	
						Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	4 Dokumen	739.952.000,00	709.893.534,00	(30.058.466,00)	
	2	13	04	1.01	0006	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa					-	
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	4 Dokumen	639.910.000,00	599.910.000,00	(40.000.000,00)	





2	13	04	1.01	0007	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa							-
						jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	40 Orang	100 Orang	31.018.000,00	10.018.000,00	(21.000.000,00)	
2	13	04	1.01	0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan							-
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	4 Dokumen	3.142.485.988,00	1.194.769.988,00	(1.947.716.000,00)	
2	13	04	1.01	0009	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan							-
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	4 Dokumen	444.397.094,00	444.397.094,00		-
2	13	04	1.01	0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa							-
						jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	180 Orang	200 Orang	1.614.032.000,00	1.528.220.000,00	(85.812.000,00)	
2	13	04	1.01	0011	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD							-
						Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	160 Orang	50 Orang	43.499.000,00	21.659.000,00	(21.840.000,00)	
2	13	04	1.01	0012	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis							-
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	-	4 Dokumen	0,00	58.466,00	58.466,00	
2	13	04	1.01	0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa							-
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2 Dokumen	4 Dokumen	1.843.520.000,00	1.680.020.000,00	(163.500.000,00)	





	2	13	04	1.01	0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa					-
						Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2 Dokumen	4 Dokumen	537.650.400,00	507.650.400,00	(30.000.000,00)
	2	13	04	1.01	0018	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota					-
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	-	4 Dokumen	0,00	131.600,00	131.600,00
4	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa (LKD)	72 Persen	9.357.342.555,00	7.927.762.055,00	(1.429.580.500,00)
							Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat.	72 Persen			
	2	13	05	1.01		<i>Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa</i>	72 Persen	9.357.342.555,00	9.357.342.555,00	-
	2	13	05	1.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					-
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	4 Dokumen	1.850.000.000,00	0,00	(1.850.000.000,00)
	2	13	05	1.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					-
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	2 Lembaga	50 Lembaga	1.636.045.918,00	2.458.761.918,00	822.716.000,00





						Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya						
2	13	05	1.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa							-
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	4 Dokumen	1.318.800.000,00	1.268.800.000,00	(50.000.000,00)	
2	13	05	1.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna							-
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	4 Laporan	1.044.916.637,00	818.481.637,00	(226.435.000,00)	
2	13	05	1.01	0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa							-
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen	4 Dokumen	507.580.000,00	381.718.500,00	(125.861.500,00)	
2	13	05	1.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga							-
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	
J U M L A H									50.646.581.262,34	38.480.627.510,00	(12.165.953.752,34)	





BAB V PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan visi dan misi daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

Upaya percepatan pencapaian target pembangunan menjadi dasar utama untuk penentuan program dan kegiatan dalam pengajuan usulan rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025. Penentuan Program dan Kegiatan tersebut merujuk kepada hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 sampai dengan triwulan I.

Dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, empat program, 11 kegiatan dan 57 sub kegiatan yang berubah anggarannya sebagaimana hasil analisis kebutuhan program/kegiatan dengan tetap memperhatikan ketercapaian output dan outcome dengan kebutuhan alokasi anggaran sebesar Rp.38,480,627,510,00,-.

Palangka Raya, Juli 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah,



H. ARYAWAN, S.IP., M.IP

Pembina Utama Muda

NIP.19700514 200604 1 010



**PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																			56.260.619.983,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							56.315.505.326,00	50.646.581.262,34	38.480.627.510,00	-17.834.877.816,00								56.260.619.983,00		
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							56.315.505.326,00	50.646.581.262,34	38.480.627.510,00	-17.834.877.816,00								56.260.619.983,00		
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				-	91 Persen	31.740.505.326,00	31.051.271.225,34	22.917.606.973,00	-114.885.343,00								31.625.619.983,00		
	2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai aturan.				-	91 Persen	8.383.756.497,00	2.997.825.663,48	2.668.534.341,00	-5.715.222.156,00								8.492.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5 Dokumen	3 Dokumen	15.750.000,00	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah				20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																				
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					20 Dokumen	2 Dokumen	19.146.500,00	19.146.500,00	19.146.500,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah				20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																				
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					40 Dokumen	1 Dokumen	37.125.135,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-17.125.135,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah				40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																				
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					15 Laporan	8 Laporan	10.284.783,00	10.284.783,00	10.284.783,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah				12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					25 Laporan	3 Laporan	8.301.450.079,00	2.932.644.380,48	2.603.353.058,00	-5.698.097.021,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah				8.400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
								-	-	7.168.926.099,00	9.296.661.255,00	9.296.661.255,00	2.127.735.156,00								7.260.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/ Bulan	644 Orang/ Bulan	7.110.571.638,00	9.238.306.794,00	9.238.306.794,00	2.127.735.156,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah			7.200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2300 Dokumen	12 Dokumen	34.854.600,00	34.854.600,00	34.854.600,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah			35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	13.499.985,00	13.499.985,00	13.499.985,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	4 Laporan	9.999.876,00	9.999.876,00	9.999.876,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah				-	91 Persen	58.112.247,00	118.112.247,00	118.112.247,00	60.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	Pemerintah daerah lokal, sektor swasta, kelompok masyarakat		63.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				10 Dokumen	2 Dokumen	9.767.099,00	9.767.099,00	9.767.099,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	60.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah			45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				14 Laporan	14 Laporan	8.345.148,00	8.345.148,00	8.345.148,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah			8.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.084.900.500,00	624.900.500,00	624.900.500,00	-460.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah			1.093.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	1 Paket	461.867.500,00	1.867.500,00	1.867.500,00	-460.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah			465.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				10 Dokumen	10 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah			8.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				20 Orang	20 Orang	240.004.000,00	240.004.000,00	240.004.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah			240.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				20 Orang	20 Orang	375.029.000,00	375.029.000,00	375.029.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah			380.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.966.015.000,00	4.020.208.141,86	2.964.217.199,00	-1.001.797.801,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah			3.988.325.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	250.015.000,00	250.015.000,00	250.015.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah			255.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				9 Paket	9 Paket	650.000.000,00	690.000.000,00	690.000.000,00	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah			692.325.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	66.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah			66.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	101.193.141,86	101.193.142,00	-398.806.858,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah			550.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45 Laporan	45 Laporan	800.000.000,00	400.000.000,00	266.351.422,00	-533.648.578,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah			810.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	1.600.000.000,00	2.213.000.000,00	1.290.657.635,00	-309.342.365,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah			1.610.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
							-	-	4.800.000.000,00	4.211.780.470,00	698.607.359,00	-4.101.392.641,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah			4.450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	2.500.000.000,00	401.000.000,00	0,00	-2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah			2.150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	500.000.000,00	359.137.635,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	700.000.000,00	2.591.642.835,00	634.607.359,00	-65.392.641,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah			700.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	750.000.000,00	500.000.000,00	0,00	-750.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah			750.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	350.000.000,00	360.000.000,00	64.000.000,00	-286.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah			350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.378.794.983,00	3.315.794.983,00	3.178.450.354,00	-200.344.629,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		3.378.794.983,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	100 Laporan	29.120.000,00	29.120.000,00	29.120.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah			29.120.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	849.674.983,00	849.674.983,00	712.330.354,00	-137.344.629,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah			849.674.983,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.500.000.000,00	2.437.000.000,00	2.437.000.000,00	-63.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah			2.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.900.000.000,00	6.465.987.965,00	3.368.123.718,00	468.123.718,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		2.900.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUB JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				28 Unit	28 Unit	500.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	-100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				71 Unit	71 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	2.000.000.000,00	5.665.987.965,00	2.568.123.718,00	568.123.718,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah			2.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				24 Unit	24 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase fasilitasi kerja sama desa				-	72 Persen	650.000.000,00	579.503.000,00	354.162.000,00	50.000.000,00							700.000.000,00		
	2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	<i>Persentase pelaksanaan fasilitasi kerja sama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi</i>				-	72 Persen	650.000.000,00	579.503.000,00	354.162.000,00	-295.838.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan	Pemerintah daerah lokal, sektor swasta, kelompok masyarakat		700.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.03.1.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga																			
			<i>Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan</i>				1 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	132.823.000,00	114.537.000,00	14.537.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan</i>				1 Dokumen	4 Dokumen	550.000.000,00	446.680.000,00	239.625.000,00	-310.375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan			550.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase fasilitasi tata kelola desa				-	10 72 Persen Persen	9.725.000.000,00	9.658.464.482,00	7.281.096.482,00	10.000.000,00							9.735.000.000,00	
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<i>Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.</i>				-	72 Persen	9.725.000.000,00	9.658.464.482,00	7.281.096.482,00	-2.443.903.518,00			-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan	Pemerintah daerah lokal, sektor swasta, kelompok masyarakat		9.735.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa</i>				1 Dokumen	4 Dokumen	125.000.000,00	82.000.000,00	68.868.400,00	-56.131.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan			125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa</i>				1 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000.000,00	540.000.000,00	515.000.000,00	-485.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan			1.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	2.13.04.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa																				
			<i>Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa</i>				-	1 Dokumen	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	2.13.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																				
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</i>				1 Dokumen	4 Dokumen	750.000.000,00	739.952.000,00	709.893.534,00	-40.106.466,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan			750.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	2.13.04.1.01.0006	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																				
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa</i>				1 Dokumen	4 Dokumen	600.000.000,00	639.910.000,00	599.910.000,00	-90.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan			600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	2.13.04.1.01.0007	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa</i>				40 Orang	2 Orang	150.000.000,00	31.018.000,00	10.018.000,00	-139.982.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan			210.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan</i>				2 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000.000,00	3.142.485.988,00	1.194.769.988,00	-805.230.012,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan			2.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0009	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan</i>				2 Dokumen	4 Dokumen	350.000.000,00	444.397.094,00	444.397.094,00	94.397.094,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan			350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa																		
			<i>jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina</i>				180 Orang	200 Orang	2.500.000.000,00	1.614.032.000,00	1.528.220.000,00	-971.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan			2.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0011	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD				160 Orang	50 Orang	150.000.000,00	43.499.000,00	21.659.000,00	-128.341.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.04.1.01.0012	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis				-	1 Dokumen	0,00	0,00	58.466,00	58.466,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.04.1.01.0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				2 Dokumen	4 Dokumen	1.500.000.000,00	1.843.520.000,00	1.680.020.000,00	180.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan			1.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.04.1.01.0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa				2 Dokumen	4 Dokumen	600.000.000,00	537.650.400,00	507.650.400,00	-92.349.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan			600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.04.1.01.0018	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen	0,00	0,00	131.600,00	131.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
4.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa (LKD)				-	72 Persen	14.200.000.000,00	9.357.342.555,00	7.927.762.055,00	0,00							14.200.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa				-	72 Persen	14.200.000.000,00	9.357.342.555,00	7.927.762.055,00	-6.272.237.945,00			-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan	Pemerintah daerah lokal, sektor swasta, kelompok masyarakat		14.200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	4 Dokumen	7.000.000.000,00	1.850.000.000,00	0,00	-7.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan			7.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya				2 Lembaga	50 Lembaga	2.500.000.000,00	1.636.045.918,00	2.458.761.918,00	-41.238.082,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan			2.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 Dokumen	4 Dokumen	600.000.000,00	1.318.800.000,00	1.268.800.000,00	668.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan			600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>				1 Laporan	4 Laporan	600.000.000,00	1.044.916.637,00	818.481.637,00	218.481.637,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan			600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.05.1.01.0008		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa</i>				1 Dokumen	4 Dokumen	500.000.000,00	507.580.000,00	381.718.500,00	-118.281.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.05.1.01.0009		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</i>				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan			3.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
J U M L A H									56.315.505.326,00	50.646.581.262,34	38.480.627.510,00	-17.834.877.816,00							56.260.619.983,00		